

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



**Oleh:**

**Iqbal Mursyid  
NIM: 122211039**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Iqbal Mursyid

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Iqbal Mursyid  
Nomor Induk : 122211039  
Jurusan : *Hukum Pidana Islam*  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS I  
SEMARANG**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 27 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Eman Sulaeman, M.H  
NIP. 19650605 199203 1 003

  
Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.L., M.Ag  
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof.Dr.Hamka Km. 2 Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Iqbal Mursyid  
NIM : 122211039  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI  
NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada  
tanggal:

**9 Januari 2019**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I  
tahun akademik 2019 dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum.

Semarang, 23 Januari 2019


Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

  
Rustam Dahar Apollo Harsa, S.P., M.H.  
NIP. 196907231998031005

  
Drs. H. Eiman Sulaeman, M.H.  
NIP. 19506051992031003

Penguji I,

  
H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002

Penguji II,

  
Drs. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.  
NIP. 197701202005011005

Pembimbing I

  
Drs. H. Eiman Sulaeman, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

  
Dr. H. Naili Anafah, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
“(QS. Al-Insyirah Ayat: 6).”

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta, Bapak Khoirun dan Ibu Juwariyah yang tidak pernah putus mendoa'kan, dan selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Saudara-Saudaraku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

**Penulis**

**Iqbal Mursyid**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Nopember 2018

Deklarator,



Iqbal Mursyid  
NIM: 122211039

## ABSTRAK

Pembebasan Bersyarat adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana dan suatu hak bagi narapidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat diberikan kepada semua narapidana yang berkelakuan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembebasan bersyarat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 12 Tahun 2013 dan No 21 Tahun 2016 tentang syarat dan tatacara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan cuti Bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat maka putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi berubah. Karena pada akhirnya terpidana tidak harus menjalani secara penuh hukuman yang dijatuhkan kepadanya setelah memenuhi syarat, dan tatacara untuk mendapatkan pembebasan bersyarat kepadanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian muncul rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lokasi yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan mengadakan wawancara dan meminta data-data yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah ditetapkan. Pembebasan bersyarat dalam hukum pidana Islam menyebutkan sebagai *pengampunan*. Maksud dan tujuan dari pemberian *pengampunan* salah satunya adalah untuk menjaga

kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. *Pengampunan* hanya berlaku dalam jarimah *Ta'zir*, karena dalam penetapan hukumnya belum jelas dikatakan dalam *nas* Allah yaitu Al-Qur'an. sebab jarimah *Qishas* dan *Hudud* jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu dalam *nas* Al-Qur'an. Oleh karena itu dalam pemberian pembebasan bersyarat termasuk dalam jarimah *Ta'zir*, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Dalil *pengampunan* dalam jarimah *Ta'zir* terdapat di Q.S An-Nissa Ayat 16.

*Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat dan Hukum Islam.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: ***“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG”*** Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan dan jajaran Wakil dekan I, II dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku dosen pembimbing I dan Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II saya ucapkan terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Rustam DKAH selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Segenap pegawai Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang sudah membantu penulis untuk mengumpulkan data.
9. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
10. Terimakasih untuk temen-temen seperjuangan Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2012.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral dan materiil.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**

**Iqbal Mursyid**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARAS I .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM PIDANA DAN PEMIDANAAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	22
1. Hukum Pidana (Hukum Positif) .....	22
2. Hukum Pidana Islam .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan.....	33
1. Pemidanaan Dalam Hukum Positif.....	33
2. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam.....	42

C. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat..56	
1. Pembebasan Bersyarat Dan Dasar Hukum .....56	
D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pemasyarakatan....62	

### **BAB III: PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

<b>A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....70</b>	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas Semarang .....70	
2. Visi Dan Misi Sistem Pemasyarakatan .....73	
3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. ....74	
4. Tujuan, Fungsi Dan Sasaran Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....76	
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Lapas Kelas I Semarang .....80	
6. Struktur Kepengurusan Lapas Kelas I Semarang .....88	
<b>B. Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....94</b>	
1. Narapidana Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang .....94	

2. Dasar Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	98
3. Proses, Prosedur dan Tahapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lapas Kelas I Semarang .....	103

#### **BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

A. Analisis Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	115
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	126

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	136
B. Saran .....	138

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana telah diketahui bersama, Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya negara menjumpai banyak berbagai rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan pelanggar hukum sebagai terpidana dalam suatu lembaga tugas negara belumlah selesai malah justru baru dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna. Tercapai atau tidaknya tugas negara tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha

pembinaan terpidana dalam lembaga yang menjadi tanggung jawab negara.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya dan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.

---

<sup>1</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta. Fikahati Anesa. 2010. Hlm. 133.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembinaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 1.

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tidak ada upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>3</sup>

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*staftbaar feit*”.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana* (Bagian 1) Jakarta, Raja Grafindo Persada 2002. Hlm. 2



Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar* *feit* itu, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana Islam/fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>5</sup>

Tujuan dari terbentuknya lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah membentuk warga binaan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. September 2012. hlm. 12.

Oleh karena itu istilah pemasyarakatan dalam hukum Islam sama dengan Ta'zir, yang dimana dalam hukum pidana Islam Ta'zir memiliki berbagai arti. Yaitu:

1. مَنَعَ وَرَدَّ Yang artinya mencegah dan menolak.
2. أَدَّبَ Yang artinya mendidik.
3. عَظَّمَ وَوَقَّرَ Yang artinya mengagungkan dan menghormati.
4. أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ Yang artinya membantunya, menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama: الْمَنعُ وَالرَّدُّ (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua: التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Qodir Audah<sup>6</sup> dan Wahbah Zuhaili.<sup>7</sup> Ta'zir diartikan mencegah dan menolak ( الْمَنعُ وَالرَّدُّ ) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik ( التَّأْدِيبُ ), karena takzir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki

---

<sup>6</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Jus I, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 81.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jus VI, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 197.

pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>8</sup>

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالْتَّعْزِيرُ تَأْذِيْبٌ عَلٰى ذُنُوْبٍ لَّمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

*Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.*

Wahbah Zuhaili<sup>9</sup> memberikan definisi ta'zir yang

mirip dengan definisi Al-Mawardi:

وَهُوَ شَرْعًا : الْعُقُوْبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جُنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيْهَا وَلَا كَفَّارَةَ

*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarar.*

Diterangkan oleh Al-Mawardi, bahwa Ibrahim Unais

dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir menurut syara'

sebagai berikut:

الْتَّعْزِيرُ يُرْشِدُ عَنِ تَأْذِيْبٍ لَا يَبْلُغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2013. Hlm. 248-249.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *loc. Cit.*

*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.*<sup>10</sup>

Tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Dalam undang-undang Indonesia yang mengatur tentang konsep pemasyarakatan, yang dimana setiap tindak pidana akan memasuki dan mendapat perhatian khusus dan hak-hak khusus yang dimana pelaku tindak pidana akan di masukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dimana undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan adalah dalam Undang-undang Nomor 12

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Loc. Cit.* 249.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 3.

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14. Bahwa dalam undang-undang tersebut mengatur dan menjamin hak-hak narapidana dan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain, yaitu:<sup>12</sup>

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu dalam undang-undang diatas, penyusun dapat mengambil garis besar dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun mengenai hak-hak bagi narapidana dan warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan poin khusus yang terletak pada huruf K yang berbunyi “*Mendapatkan Pembebasan Bersyarat*”. Karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan berwenang untuk memberikan pelayanan kepada para penghuni (narapidana) dan tidak berhak untuk memutuskan memberi pembebasan bersyarat, melainkan

hanya berhak mengusulkan agar narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan demikian penyusun mengambil intisari dalam menyusun penelitian skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”**. Hal yang mendorong penyusun tertarik dengan tema diatas adalah, dikarenakan dalam proses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyaratakan Kelas I Semarang sangatlah mudah dicapai oleh para narapidana untuk mendapatkan bebas bersyarat. Di dalam penelitian ini penyusun menekankan sasaran penelitian ini di tahun 2017, bagaimana proses pelaksanaan dan penerapan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dan dimana dalam peraturannya memerlukan proses dan mekanisme yang sangat panjang untuk bisa mendapatkan pelepasan bersyarat, bagaimanakah alur mekanisme syarat-syarat dan prosedurnya dalam pemberian pembebasan bersyarat apakah telah sesuai

dengan yang tertulis dalam peraturan tersebut bisa terlaksana dengan semestinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun membuat berapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pemberian Pemberian Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukuim Islam terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana.



Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk sumbang saran untuk pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.
2. Secara prakteknya diharapkan dapat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, dan baik itu pelaksanaan pemberian pembebas bersyarat bagi narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, penyusun akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya:

Skripsi yang *pertama* yaitu karya dari QIWAMUDDIN TATA ADI SASMITA, mahasiswa Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yogyakarta)*”. Penelitian ini merupakan penelitian (*field resarch*), bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan psikoanalisis dan normatif, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyaraktan Klas II A Yogyakarta.<sup>13</sup>

Skripsi yang *kedua* yaitu karya dari MUHAMMAD HAFIDH, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum*

---

<sup>13</sup> Qiwamuddin Tata Adi Sasmita. “*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yogyakarta)*”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

*Positif*”). Penelitian yang diambil dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian literatur atau kajian pustaka.<sup>14</sup>

Skripsi yang *ketiga* yaitu karya dari ARINAL NURRISYAD HANUM, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman yang berjudul “*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*”. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data disajikan secara sistematis serta dianalisis dengan metode kuantitatif.<sup>15</sup>

Skripsi yang *keempat* yaitu karya dari ARDY KURNIAWAN BOMBING, mahasiswa Fakultas Hukum

---

<sup>14</sup> MUHAMMAD HAFIDH. “*Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.

<sup>15</sup> Arinal Nurrisyad Hanum. “*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. 2012.

Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “*Pemenuhan Hak Narapidana Meendapatkan Bebas Bersyarat studi Kasus Di Rutan Kelas II B Makale*”. Penelitian ini dilakukan di RUTAN Klas IIB Makale. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencatat arsip-arsip, dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pembebasan bersyarat. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana proses pemberian bebas bersyarat di Rutan Klas II B Makale.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari keempat penelitian diatas, menunjukkan bahwa penelitian tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam

---

<sup>16</sup> Ardy Kurniawan Bombing. “*Pemenuhan Hak Narapidana Meendapatkan Bebas Bersyarat studi Kasus Di Rutan Kelas II B Makale*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. 2013.

skripsi ini penyusun menekankan membahas mengenai praktik dalam proses untuk pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Jadi, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Emperis. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau perundang-undangan. Sedangkan Empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada dalam sistem pemberian pembebasan bersyarat

kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penyusun gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Obyek penelitiannya adalah berupa lapangan yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*).<sup>17</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberi gambaran selengkap-lengkapny mengenai sistem pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

## 3. Sumber Data

---

<sup>17</sup> Hadari Nawawi dan Nini Martini, “*Penelitian Terapan*”, (yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 174.

Data yang disajikan oleh penyusun diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh penyusun dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 semarang. Data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis, undang-undang, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>18</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, staf di bagian Pembimbingan kemasyarakatan, dan beberapa narapidana yang menyangkut dengan tema penelitian dalam penyusunan skripsi ini, serta dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

---

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>19</sup> Yang berupa dokumen-dokumen tertulis, undang-undang, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>20</sup> yang dilakukan dengan narasumber. Yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, staf di bagian Pembimbingan kemasyarakatan, dan beberapa narapidana yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Marzuki, "*Metodologi Riset*" Yogyakarta; BPFE, 2006, hlm. 62.



menyangkut dengan tema penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>21</sup> Metode analisis data dalam penelitian ini, penyusun mengolah data dengan menggunakan metode *deskriptif*, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada pelaksanaan pemberian

---

<sup>21</sup> Lexy. J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung; Remaja Rosda Karya, 2010, hlm. 178-179.

pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penyusun bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama** berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab Kedua** berisi mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana dan hukum pidana islam yang pembahasannya mencakup macam-macam jarimah, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, pengertian pembebasan bersyarat beserta dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat, konsep pemasyarakatan..

**Bab Ketiga** dijelaskan mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dan proses pemberian pembebas bersyarat kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

**Bab Keempat** dijelaskan mengenai analisis hukum Islam terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan bagaimana pelaksanaannya.

**Bab Kelima** adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dijelaskan mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PIDANA DAN PEMIDANAAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

##### **1. Hukum Pidana (Hukum Positif)**

Menurut Mahrus Ali,. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana*, beliau memaparkan tentang hukum pidana dalam arti hukum formil dan hukum pidana materiil yang memiliki hubungan yang erat, hukum pidana materiil tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh hukum formil. Hukum pidana formil juga sebaliknya, hukum pidana formil tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana materiil.<sup>1</sup>

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali,. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hlm. 5.

negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>2</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil yang ada di poin 1 dan 2, dan tetapi juga hukum pidana formil di poin ke 3

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Renika Cipta, Jakarta. 2008. hlm. 1.

yang telah diuraikan diatas tadi. Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Sudarsono, dalam kutipan yang tertera dan telah saya baca.<sup>4</sup> Pada prinsipnya Hukum Pidana adalah mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatannya tersebut diancam pidana yang merupakan suatu penderitaan. Definisi lain adalah “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan.

Menurut Adami Chazawi mengartikan hukum pidana adalah sebagai sebagian dari hukum publik yang

---

<sup>3</sup> *Log. Cit.* Mahrus Ali,. Hlm. 1-2.

<sup>4</sup> <http://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>. Selasa, 27 Februari 2018. Pukul: 21:16 WIB.

memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tentunya yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan,

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 1)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 2.

menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Istilah Hukum Pidana menurut Satochid Kartanegara dalam Kumpulan Kuliah Hukum Pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatyaikan bahwa Hukum Pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut.<sup>6</sup>

Hukum pidana obyektif atau disebut dengan *ius poenale*, adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi sama artinya dengan hukum pidana materiil.

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarto. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Januari 2015. Hlm. 167.



Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel Suringa yang menyatakan bahwa *ius poenale* adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya.

Sedangkan pidana subyektif atau disebut *ius poeniendi* sebagai aspek subyektifnya hukum pidana, dalam arti aturan yang berisi atau mengenal hak atau kewenangan negara:

- 1) Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban hukum.
- 2) Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut; serta
- 3) Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi “*Pelajaran Hukum Pidana (bagian 1)*”. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 9.

Sebagai organisasi terbesar, tinggi dan terkuat, hanyalah negara yang berhak dan berwenang untuk menentukan hukum pidana dan menjalankannya dalam arti, negara sebagai satu-satunya subjek hukum yang boleh menentukan aturan-aturan yang mengikat semua warga, serta mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya, agar aturan-aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.

Jadi dari segi subjektif, negara memiliki dan memegang 3 kekuasaan/hak fundamental, yakni:

- a. Hak untuk menentukan perbutan-perbuatan mana yg dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya.
- b. Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar aturan hukum pidana yang telah dibentuk tadi; dan

- c. Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya/petindaknya tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam kajian hukum islam, istilah "hukum pidana islam" diambil dari terjemahan *fiqh jinayah*. Fiqh adalah ketentuan-ketentuan hukum islam yang merupakan upaya pemahaman manusia, dalam hal ini ulama terhadap syariat. Sedangkan jinayah berarti pidana. Dengan demikian bisa dipahami bahwa *fiqh jinayah* adalah hukum islam yang mengatur

---

<sup>8</sup> *Ibid* . Adami Chazawi. Hlm. 10.

persoalan pidana. Dalam istilah bahasa Inggris, *fiqh jinayah* dikenal dengan *Islamic Criminal Law*.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana islam/fikih *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>10</sup>

Fikih *Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu Fikih dan *Jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf adalah sebagai berikut.

الْفَقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِأَلَا حُكَامِ الشَّرِّ عِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ  
أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. أَوْ هُوَ مَجْمُوعُ عَهْ الْأَحْكَامِ الشَّرِّ عِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ  
الْمُسْتَقَا دَةً مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

---

<sup>9</sup> <http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hukum-pidana-islam-dan-fiqh-jinayah.html?m=1>. Selasa, 27 Februari 2018. Pukul 21:44 WIB.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, . *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. September 2012. Hlm. 12.

*Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.*

Adapun Jinayah menurut bahasa adalah.

إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَا اكْتَسَبَهُ

*Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.*

Pengertian Jinayah secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah.<sup>11</sup>

فَالْجَنَائِيَّةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى  
نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.*

Dalam konteks ini pengertian Jinayah sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz I, Dar Al Kitab Al 'Araby, Bairut, tanpa tahun, hlm 67.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam fikih jinayah*. Jakarta. Sinar Grafika 2006. Hlm. 1.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا  
بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.*

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian Fikih Jinayah itu adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Pengertian fikih jinayah tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam fikih jinayah*. Jakarta. Sinar Grafika 2006. Hlm. 1-2.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pidanaan**

### **1. Tinjauan Pidanaan Dalam Hukum Positif**

Selain teori pidanaaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pidanaaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidanaaan pada Pasal 45, yaitu:<sup>14</sup>

1. Pidanaaan bertujuan
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali,. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hlm. 188.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pidanaan di atas perumusan Konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.<sup>15</sup>

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaan yang dianut orang-orang saat ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapatkan dari para-pemikir berabad-abad yang lalu. Dari pemikiran para pemikir yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 188-189.



telah ada, ternyata tidaklah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat tiga (3) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjaditidak mampu.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta

---

<sup>16</sup> Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta:Alfabeta, 2010), hlm. 52.

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>17</sup>

Jadi, putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cerminan peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan. Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004. Hlm. 33.

<sup>18</sup> *Ibid.* Bambang Waluyo, hlm. 33-34.

dihayati oleh para sarjana tersebut.<sup>19</sup> Secara tradisional teori-teori pembedaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pembedaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).

Menurut teori pembalasan tujuan dari pembedaan adalah unruk pembalasan, dan dikenal pada akhir abad 18. Teori pembalasan ini ada yang bercorak cubjektif, yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuatan tercela, dan ada yang bercorak objektif, yang pembalsannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Menurut Karl O. Cristiansen memberi ciri pokok atau karakteristik pada teori absolut:

---

<sup>19</sup> Dwidja Priyatno., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2006. Hlm. 22-23.

<sup>20</sup> Berlian Simamarta, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris (Jurnal Mimbar Hukum Volume 23)*, nomor 3, Oktober 2011, hlm. 504.

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>21</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltherieen*)

Menurut teori tujuan/relatif berpendapat bahwa tujuan pemidanaan terletak pada tujuan itu sendiri, yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>22</sup>

Teori tujuan itu ada yang bersifat:

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika. 2012.hlm.188-189.

<sup>22</sup> *Log Cit.* Berlian Simamarta.

- a. Umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
- b. Khusus, yaitu mencegah si penjahat untuk tidak mengulangi lagi kejahatan.
- c. Ada yang memperbaiki si pembuatan kejahatan, agar menjadi manusia baik dengan *reclassering*, bahwa menjalani pidana harus disertai pendidikan.
- d. Ada yang menyingkirkan penjahat, yang ditujukan terhadap penjahat tertentu yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dilakukan dengan penjara seumur hidup atau pidana mati.

Menurut Karl O. Christiansen memberikan ciri pokok atau karakteristik pada teori Utilitarian.<sup>23</sup>

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>23</sup> *Log Cit.* Mahrus Ali,.

- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karen sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya hukum pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Teori Gabungan

Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun idia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh

antara lain perbaikan sesuatu yang merusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>24</sup>

Menurut teori gabungan, pemidanaan di dasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang ditetapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan dengan salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun padfa semua unsur yang ada.

Ketiga teori diatas dapat dipadatkan menjadi dua golongan yaitu teori pembalasan dan teori kemanfaatan. Teori pembalasan mengutamakan kepentingan korban atau pihak yang dirugikan, yang lebnih mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum daripada kepentingan yang lain. Teori pembalasan ini dipraktikkan di dalam sistem kepenjaraan. Sedangkan dengan tteori kemanfaatan yaitu manfaat hukuman yang di jatuhkan atau dijalankan oleh si pembuat kejahatan, kepentingan si korban, yang telah menderita akibat perbuatan si pembuat kejahatan melalui dengan penjatuhan pidana penjara, berupa pencabutan

---

<sup>24</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 26-27.

hilangnya hak kebebasan untuk jangka waktu yang tertentu. Kepentingan si pembuat kejahatan juga diperhatikan melalui pembinaan guna menumbuhkan kesadaran bahawa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang banyak.

## 2. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam

Hukuman atau ppidanaan dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. Lafaz ‘uqubah menurut bahasa adalah berasal dari kata: ( عَقَبَ ) yang sinonimnya: ( خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ ). Artinya: *mengiringnya dan datang di belakang*.<sup>25</sup> Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: ( عَاقَبَ ) yang sinonimnya: ( جَزَاهُ ), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hlm 136.



hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pencegahan ( الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ )

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-meneruskan melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 137.

berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari liongkungan jarimah.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang attau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai.<sup>27</sup>

## 2. Perbaikan dan pendidikan ( *الإصلاح والتَّهْذِيبُ* )

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap pelaku

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 138.

jarimah, dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berfikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatan itu diketahui oleh orang lain atau tidak.<sup>28</sup>

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman yang bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batasan-batasan hak dan kewajibannya. Hukuman atau pembedaan atas

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 138-139

diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya . dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>29</sup>

Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

**a. Jarimah Hudud**, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.<sup>30</sup>

Dalam hukum Islam, Hukuman *hudud* dibatasi karena tindak pidana ini disebutkan di dalam *nash*,

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 39.

<sup>30</sup> Makhsum Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 44-45.

yakni dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW<sup>31</sup>.

*Had/Hudud* ialah larangan mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Melalui perantara pemukulan dan pembunuhan. Jadi yang dimaksud *Had/Hudud* Allah adalah hal-hal yang diharamkan Allah dan diperintahkanNya supaya dijaui dan tidak mendekatinya.<sup>32</sup>

Hukuman *had* dijatuhkan dalam tujuh perkara berikut ini:

- 1) Hukuman yang dituntut karena melakukan pembunuhan, penganiayaan sampai mati, atau yang mengakibatkan cacat tubuh.
- 2) Hukuman karena pencurian dengan potong tangan.

---

<sup>31</sup> A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. "*Hudud dan Kewarisan*", Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996, hlm. 7.

<sup>32</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, Cet. VIII, (Jakarta: Darul, Haq. 2013), hlm. 1125.

- 3) Hukuman bagi pezina: dirajam<sup>33</sup> sampai mati bagi yang sudah menikah, dan dicambuk seratus kali bagi yang belum menikah.
- 4) Hukuman bagi yang menuduh tanpa bukti berupa delapan kali cambukan.
- 5) Hukuman mati bagi yang murtad.
- 6) Hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali karena mabuk.
- 7) Hukuman karena perampokan (*Qata' al-Thaliq*): dihukum mati, potong tangan dan kaki bersilang, atau diasingkan berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>34</sup>

**b. Hukuman Qisas dan Diyat,** yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qisas* dan *diyat*.

*Jarimah qisas* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah

---

<sup>33</sup> Dilempari menggunakan batu yang sederhana sampai mati.

<sup>34</sup> A. Rahman I'Doi, *Hudud dan Kewarisan, Op.Cit*, hlm. 15.

ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>35</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisas* dan *diyat* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- 2) Hukuman tersebut adalah hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarga berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

*Jarimah qisas* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan disengaja.
- 2) Pembunuhan menyerupai disengaja.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan.
- 4) Penganiayaan disengaja, dan
- 5) Penganiayaan tidak disengaja.<sup>36</sup>

**c. Hukuman Ta'zir**, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

*Ta'zir* secara harfiah berarti membinasakan pelaku criminal karena tindak pidana yang memalukan. Ta'zir adalah sanksi yang ukurannya ditentukan hakim atau dalam hukum positif (perundang-undangan), dalam bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat criminal atau tindak amoral yang dilakukan, tingkat bahaya, perbedaan status pelaku, serta alasan

---

<sup>36</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Bandung. Pustaka Setia, 2000., hlm. 29.



yang cukup untuk dapat membuat mereka jera atau dapat mencegah agar mereka tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, yakni dengan penjara, dera, pengasingan, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak dapat ditetapkan dengan ketentuan hukum, dan hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang.<sup>38</sup>

### 3. Pengampunan Dalam Hukum Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Pengampunan berasal dari kata "*ampun*" yang berarti pembebasan dari

---

<sup>37</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, Cet. III. Jakarta: Amzah. 20013., hlm. 138.

<sup>38</sup> A. Rahman I Doi, *Op.Cit.*, hlm. 16.

hukuman atau tuntutan.<sup>39</sup> Di dalam fikih Islam, pengampunan dikenal dengan sebutan *al-Syaffa'at* atau *al-'afwu* yang artinya adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan<sup>40</sup>, di mana hal tersebut juga bermakna pembebasan bersyarat.

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena agama Islam merupakan agama *rahmatan lil al-'amin*. Untuk memperbaiki prilaku dan pelajaran kepada manusia.<sup>41</sup>

Dalam jarimah *ta'zir* terdapat pengampunan yang dapat meringankan hukuman pelaku namun antara keduanya ada

---

<sup>39</sup> Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005., hlm. 38.

<sup>40</sup> Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, *Mujmal Al-lughot*, Beirut: Dar al-fikr, 1414H/1994M, hlm. 72

<sup>41</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996, hlm 25.

yang dapat diampuni ada pula yang tidak dapat diampuni atau diberikan keringanan hukuman seperti penjelasan berikut:

- a. Pengampunan terhadap tindak pidana yang tidak dapat diampuni

Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang wajib dijatuhi hukuman *hudu*, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Ini karena terhadap tindak pidana *hudud* bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana *hudud* sebagai hak Allah. Karena tindak pidana *hudud* adalah hak Allah, hukumannya tidak boleh diampuni atau dibatalkan.

Ketetapan tidak adanya pengampunan dan pembatalan hukuman atas tindak pidana *hudud* ini mengakibatkan pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi *hudud* itu berstatus sebagai orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa dan anggota badannya.

b. Pengampunan terhadap tindak pidana *ta'zir*

Pengampunan terhadap tindak pidana *ta'zir* telah disepakati oleh para fukaha bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *ta'zir*. karena itu,<sup>42</sup> penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya, baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fukaha berbeda pendapat tentang bisa tidaknya penguasa memberi pengampunan terhadap semua tindak pidana *ta'zir* atau terbatas pada sebagiannya saja.

Sebagian ulama (kelompok pertama) berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana *qisas* dan *hudud*, tetapi ia harus dijatuhi hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan

---

<sup>42</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Hlm. 171.

hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.<sup>43</sup>

Sementara itu, sebagian ulama yang lain (kelompok kedua) berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana *hudud* dan *qisas*.

Kekuasaan korban dalam memberikan pengampunan terhadap tindak pidana *ta'zir* hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan haknya (dirinya), seperti pemukulan dan cacian. Karena itu, pengampunan korban tidak berpengaruh pada hak

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Abdul Qadir Audah. 171.

masyarakat, yaitu mendidik pelaku dan memperbaikinya, sehingga jika korban mengampuni pelaku, pengampunannya itu tertuju pada hak pribadi korban saja. Sebaliknya, pengampunan penguasa atas tindak pidana atau hukuman tidak berpengaruh pada hak-hak korban.<sup>44</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat**

#### **1. Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Kementerian Kehakiman dapat memberikan keputusan pembebasan bersyarat apabila terpidana telah menjalani 2/3 dari masa pidana penjara yang dijatuhkan, dan sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan selama ia dipenjara. Dalam pembebasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Abdul Qadir Audah. 171.

- a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- b. Terpidana harus melakukan atau tidak boleh melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.<sup>45</sup>

Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terakhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan.

Apabila seseorang telah diberikan surat keputusan pelepasan bersyara, maka narapidana diberikan masa percobaan dan dalam masa percobaan ini narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah ia dilepaskan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembinaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 16.

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. Hlm. 64.

Syarat ini ada 2 macam, ialah syarat umum dan syarat khusus:

1. Syarat umum adalah berisi keharusan bagi narapidana selama masa percobaan itu tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Perbuatan tercela yang dimaksud bukan berarti berupa tindak pidana, dalam artian pengertiannya lebih luas dari tindak pidana, misalnya pergi bersenang-senang di tempat pelacuran atau di tempat hiburan malam seperti diskotik, atau bergaul dengan para penjahat, para preman dan sebagainya. Syarat umum ini bersifat imperatif (memaksa).
2. Sedangkan syarat khusus adalah segala macam ketentuan perihal kelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya. Dan syarat khusus



ini bersifat fakultatif(pilihan atau tidak diwajibkan).<sup>47</sup>

Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, maka pelaksanaan pembebasan bersyaratitu dapat dicabut. Pelaksanaan pencabutan pembebasan dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA). Selama pembebasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat narapidana yang sedang menjalani masa percobaan pembebasan bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum. Dan paling lama masa penahanan tersebut selama 60 hari, jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian untuk sementara waktu (skorsing) atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka ia dianggap

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 64.

meneruskan menjalani pidananya semenjak hari mulainya ia ditahan.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Mengenai dasar-dasar hukum mengenai pemberian pembebasan bersyarat dapat dilihat di dalam ketentuan sebagai berikut:<sup>49</sup>

### 1. Pasal 15 KUHP:

(1). Orang yang dipidana penjara dapat dilepaskan dengan syarat, apabila telah dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya dan juga sekurang-kurangnya sembilan bulan daripada itu. Kalau orang yang dipidana itu harus menjalani beberapa kali pidana penjara seumur hidup.

### 2. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Adami Chazawi,. “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”.Hlm. 64-65.

<sup>49</sup> <http://mimpiku-wwwmimpiku.blogspot.co.id/2010/03/dasar-dasar-hukum-pembinaan-pembebasan.html>

Pasal 14 ayat (1) k: Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>50</sup>

3. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK.04.10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas tanggal 2 Februari 1999:
4. PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. PERMENKUMHAM No 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>51</sup>
6. PERMENKUMHAM No 21 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan

---

<sup>50</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>51</sup> PERMENKUMHAM No 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Hak Asasi Manusia No 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>52</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Konsep Pemasyarakatan**

##### **A. Konsepsi Pemasyarakatan**

Dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka

---

<sup>52</sup> PERMENKUMHAM No 21 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

membentuk Warga Binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>53</sup>

Menurut Sahardjo bahwa tujuan pidana adalah “pemasyarakatan”. Konsep pemasyarakatan ini pertama kali diperkenalkan oleh beliau yang dikemukakan dalam pidatonya pada upacara menerima gelar Doctor HC dalam Ilmu Hukum di UI pada tanggal 5 Juli 1963.<sup>54</sup>

Pohon beringin pengayoman ditetapkan menjadi lambang hukum dan lambang Departemen Kehakiman, agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya, terutama dalam membina hukum, menjalankan peradilan dan memberi keadilan dalam memperlakukan para narapidana.

---

<sup>53</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 2.

<sup>54</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana “Buku Panduan Mahasiswa”*. Jakarta. Fikahati Aneska. 2010. Hlm 124.

Dan juga bertujuan mengayomi masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar tata tertib dengan mengancam tindakan si pengganggu dengan maksud untuk mencegah si pengganggu berbuat yang melanggar tata tertib di masyarakat.

Di bawah pohon beringin pengayoman telah ditetapkan menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan “di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan”. Dari pengayoman itui nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Taubat tidak dapat tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, terpidana juga tidak dijatuhkan pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup

sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Disini negara bertanggung jawab atas masyarakatnya, yang dimana tujuan pemasyarakatan adalah memperbaiki seseorang dan membuat seseorang lebih baik setelah keluar dari penjara, dan diterima kembali oleh masyarakat sosial disekitar orang tersebut tinggal.

Untuk mendidik terpidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, maka:

1. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dipeuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus atu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 124-125.

3. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan dengan Pancasila.

Konsep pemasyarakatan juga dikemukakan oleh Astrawinata (Menteri Kehakiman), Imam Bardjo (Pembantu Menteri Kehakiman Urusan Pelaksanaan Technis Departemen Kehakiman), dan Bahroedin (Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman) pada waktu Konverensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, yang diadakan di Bandung 24 april sampai dengan 9 Mei 1964.<sup>56</sup>

Dalam koverensi kerja tersebut, Konsepsi pemasyarakatan, juga dikemukakan oleh Astrawinata selaku Menteri Kehakiman pada waktu itu menegaskan bahwa “Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam konsep pemasyarakatan itu tidak dapat berlainan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep pengayoman” dan “unsur-unsur pokok yang terkandung dalam konsep

---

<sup>56</sup> I Made Widnyana, . *Asas-asas Hukum Pidana “Buku Panduan Mahasiswa”*. Jakarta. Fikahati Aneska. 2010. Hlm. 127.



pemasyarakatan” itu adalah “elemen-elemen yang dilahirkan oleh revolusi Indonesia dan mengandung unsur-unsur sosialisme indonesia berdasarkan Pancasila dan berhaluan manipol/Usdek”<sup>57</sup>

Dalam konsepsi pemasyarakatan, Astrawinata mengemukakan lima azas-azas pemasyarakatan antara lain yaitu:

1. Pemasyarakatan harus mengasaskan pendiriannya dengan teguh kepada pendapat bahwa individu yang bersangkutan itu adalah manusia biasa, Insaanul Karim, makhluk Tuhan yang tertinggi diantara makhluk-makhluk lain di dunia ini.
2. Pemasyarakatan harus mengasaskan pendiriannya dengan teguh kepada pendapat bahwa tiap-tiap manusia, hitam, putih, atau sawo matang adalah sama dan sama-sama dikaruniai dengan itikad baik oleh Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm. 127-128.

3. Pemasyarakatan harus mengasaskan pendiriannya dengan teguh kepada pendapat bahwa manusia makhluk yang hidup bermasyarakat, hidup gotong royong, penuh dengan tantangan-tantangan, *challenge-challenge* hidup terhadap mana ia selalu menyesuaikan dirinya.
4. Pemasyarakatan harus mengasaskan pendiriannya dengan teguh kepada masyarakat di luarnya adalah satu integritas, satu *integrity* dalam mana terdapat potensi-potensi yang selalu pengaruh mempengaruhi dan dimana terdapat *challenge-challenge* yang membesar *complexity* dari integriti itu.
5. Pemasyarakatan harus mengasaskan pendiriannya bahwa *complexity* dari *integrity* tersebut di atas hanya dapat diatasi dengan jalan gotong royong, tanpa *exploitasi de l'homme par l'homme*.

Karena pemasyarakatan itu pada hakekatnya salah satu penjelmaan dari gotong royong dengan sendirinya

dalam pemasyarakatan itu ada usaha-usaha timbal balik (wederzijds), yaitu narapidana harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sedangkan sebaliknya, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan narapidana dalam arti masyarakat harus mempersiapkan diterimanya kembali narapidana sebagai anggotanya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> I Made Widnyana, . *Asas-asas Hukum Pidana “Buku Panduan Mahasiswa”*. Jakarta. Fikahati Aneska. 2010. Hlm. 130.

### **BAB III**

## **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

#### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 3 januari 2018.

Gedung Lapas ini Merupakan pindahan dari lapas lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pemindahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban. Pemindahan ini disebabkan karena overkapasitas penghuni dan terutama karenan bangunan Lapas Mliten merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pembinaan di indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.

Adapun bentuk bangunan Lapas Kelas I Semarang dengan tipe Pevilium yang berdiri di atas tanah seluas 45.636 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 13.073 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Ruang Kepala.
- b. Ruang Kantor Berlantai 2.

---

<sup>2</sup> <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/> di unduh tanggal 13 Januari 2018 jam 13:33 WIB.

- c. Ruang Aula serbaguna.
- d. Ruang Kunjungan, Pembinaan dan Keamanan.
- e. Blok penghuni terdiri dari 12 Blok (daya tampung 530 orang),
  - Blok A (padepokan Abimanyu) dan blok B (padepokan Bima) merupakan tempat hunian bagi Narapidana Narkoba.
  - Blok C (padepokan Citrawirya), blok D (padepokan Drupada) dan blok E (padepokan ekalaya) merupakan tempat hunian untuk Narapidana Umum.
  - Blok F (padepokan Fatruk), blok G (padepokan Gatot Kaca), dan blok H (padepokan Hanoman) merupakan tempat hunian Tahanan.
  - Blok I (padepokan Indra) merupakan tempat hunian Tahanan Narkoba.
  - Blok J (padepokan Janaka) merupakan tempat hunian kasus Tipikor.

- Blok K (padepokan Kresna) merupakan tempat pengasingan.
  - Blok L (padepokan Lesmana) merupakan tempat hunian tahanan dengan kasus Tipikor.
- f. Tempat Ibadah (Masjid, Gereja)
  - g. Ruang Poliklinik.
  - h. Ruang Ketrampilan Kerja.
  - i. Pos Jaga Atas 7 Unit dan Pos Bawah 4 Unit.
  - j. Ruang Dapur dan Gudang.
  - k. Lapangan Sarana Olah Raga.
  - l. Rumah Dinas Pegawai.

## **2. Visi Dan Misi Sistem Pemasyarakatan**

### **a. Visi sistem Pemasyarakatan**

Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat

dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri)<sup>3</sup>

**b. Misi Sistem Pemasyarakatan**

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta mengelola benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

**3. Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

**a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 3 januari 2018.

<sup>4</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 3 januari 2018.



**b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan pernghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.
- 3) Mengembangkan kopetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan ketertiban stakeholder.

#### **4. Tujuan, Fungsi Dan Sasaran Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

a. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang adalah:<sup>5</sup>

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dirutan dan cabang rutan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

---

<sup>5</sup> <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/> di unduh tanggal 13 Januari 2018 jam 13:33 WIB.

- 3) Memberi jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

b. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan).

c. Sasaran Umum

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta

merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang tercapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- Isi lapas lebih rendah dari kapasitas.
- Menurunnya secara bertahap dari tahun ketahun angka pelarian dan gangguan keamanan lainnya.
- Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
- Semakin banyaknya jenis institusi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan warga binaan pemasyarakatan.
- Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- Prosentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
- Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- Unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.
- Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lapas dan sebaiknya semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara di dalam Lapas.

d. Sasaran Khusus

Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang kurang dalam :

- Meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Meningkatkan kualitas intelektual.
- Meningkatkan kualitas sikap dan perilaku, serta kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara.
- Meningkatkan kualitas profesionalisme/ketrampilan.
- Meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.<sup>7</sup>

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

### **Kelas I Semarang**

#### **a. Tugas Pokok**

Adapun tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik.

---

<sup>7</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 9 januari 2018.

<sup>8</sup> *Ibid.*

- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian bagi narapidana dan anak didik.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga.

**b. Fungsi**

Adapun fungsi pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Kepribadian
  - a) Pembinaan Kesadaran Beragama.
  - b) Pembinaan kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
  - c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan).
  - d) Pembinaan Kesadaran Hukum.

2) Pembinaan Kemandirian Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas I semarang antara lain:

a) Kerja Produktif meliputi:

Kerja produktif yang dilakukan oleh warga binaan pemsarakatan adalah pembuatan batako/paving balok, pembuiatan keset, pertukangan kayu, pembuatan sabun cair, pembuatan kasur lipat, pembuatan kompos, penjahitan sandal atau sepatu, cukur rambut, cuci kendaraan, penyablonan, penjahit pakaian, laundry, pengelasan (las listrik dan acetylen), dan lain sebagainya.

b) Kebersihan lingkungan meliputi:

Warga Binaan Pemsarakatan (WBP) di Lembaga Pemsarakatan Kelas I Semarang juga di beri arahan untuk menjaga lingkungan sekitar Lapas, dimana warga binaan pemsarakatan setiap pagi



membersihkkan kamar blok hunian, Warga Binaan Pemasyarakatan selain membersihkan kamarnya, juga membersihkan taman-taman di sekitar lapas secara bergantian sesuai dengan piket yang sudah terjadwal,. Tidak hanya di taman Warga Binaan Pemasyarakatan juga membersihkan lingkungan di sekitar kanttor maupun di luar kantor.

Tahapan-tahapan pembinaan nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah:<sup>9</sup>

1) Tahap Awal

Pembinaan tahap awal adalah masa pengenalan bagi para narapidana yang baru saja memasuki masa pemasyarakatan di lapas, dengan jangka 0-1/3 masa pidana, ada 2 macam dalam tahap awal ini, yaitu:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

- Admisi dan Orientasi, yaitu masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- Pembinaan Kepribadian, yaitu pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kesadaran.

Dalam tahap awal ini pembinaan masih dilakukan didalam lapas dengan pengawasan maksimum (maximum security).

## 2) Tahap Lanjutan

perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sampai dengan pelaksanaan preogram asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahapan pertama sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana yang bersangkutan. Pada tahap ini pengawasan dilakukan memasuki tahap Medium Security. Tahap kedua waktunya

dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah memasuki tahap Minimum Security. Pada tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang bebas, atau Pembebasan Bersyarat, dengan pengawasan Minimum Security sebelum akhirnya dinyatakan bebas sesungguhnya. Dalam tahap lanjutan ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:<sup>10</sup>

a.  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana

➤ Pembinaan Kepribadian Lanjutan

Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian tahap awal.

➤ Pembinaan Kepribadian

---

<sup>10</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 3 januari 2018.

Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri.

b. 1/2 - 2/3 dari masa pidana

Pada masa ini narapidana menjalani kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Asimilasi
- Dalam lapas terbuka (open camp)
- Dalam lapas (half way house / word release)
- Melanjutkan sekolah
- Kerja mandiri
- Kerja pada pihak luar
- Menjalankan ibadah
- Bakti sosial
- Olah raga
- CMK
- Dll

Dalam masa tahap lanjutan ini, pengawasan narapida telah memasuki tahap Medium Security.

### 3) Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan bagi narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini akan diberikan dari:<sup>11</sup>

- PB (Pembebasan Bersyarat)
- CMB (Cutu Menjelang Bebas)

Teruntuk bagi narapidana yang telah memenuhi syarat yang nantinya akan dilakukan pembinaan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) guna meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dalam masa tahap akhir ini pengawasan terhadap narapidana sudah memasuki tahap Minimum Security.<sup>12</sup>

## **6. Struktur Kepengurusan Lapas Kelas I Semarang**

Didalam kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, menjalankan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh pegawai sejumlah 103 orang yang terdiri dari 85 petugas laki-laki dan 18 petugas perempuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala (Kalapas) yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM jawatengah di Semarang. Dalam menjalankan tugas kesehariannya Kepala Lapas dibantu oleh para stafnya yang terdiri dari:

---

<sup>12</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 9 januari 2018.

### 1) Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan yang di Ketuai oleh Hadiyanto, S.H, MH. Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 sub bagian, yaitu:

- a) Sub Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Keuangan.
- c) Sub Bagian Kepegawaian.

### 2) Bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Bertugas mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Lapas, mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap

pelanggaran keamaandan ketertiban di lingkungan Lapas, pembuatan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Bidang ini di Ketuai oleh Toro Wiyarto, Amd. IP, S.Sos, M.Si. Bidang ini untuk melaksanakan penjagaan/pengamanan Lapas, dibentuk 4 regu pengamanan yang masing-masing regu memiliki 11 anggota disetiap regunya dan bertugas menjaga sekitar 1.400 narapidana, dan 4 regu tersebut dibagi dua shif, yaitu shif pagi dan malam.<sup>13</sup>

### 3) Bagian Pembinaan Narapidana

Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi, membuat statistik dan dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemasyarakatan, melayani kesehatan dan memberikan perawatan bagi para narapidana. Bidang ini di Ketuai oleh Kasrizal K, Bc.IP, S.H. yang dibantu oleh 3 seksi yaitu:

#### a) Seksi Registrasi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*



- b) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan.
  - c) Seksi Perawatan.
- 4) Bidang Kegiatan Kerja

Bidang ini bertugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja, memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan memilih narapidana/ anak didik yang terampil, melakukan usulan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka praktik kerja, melaksanakan pengelolaan hasil kerja dari para narapidana. Bidang ini di Ketuai oleh Hardi widioso, S.H, M.Si. yang dibantu oleh 3 seksi yaitu:

- a) Seksi Bimbingan Kerja.
  - b) Seksi Sarana Kerja.
  - c) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.<sup>14</sup>
- 5) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bidang ini bertugas menyusun jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta membuat usulan insentif petugas

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

jaga malam, memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang tatacara menggunakan peralatan pengamanan jam kontrol secara tepat, mengecek hasil hasil jam kontrol, serta mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan/ peralatan dan sarana pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggeledahan terpadu dan menginventarisir barang hasil penggeledahan, serta pengawasan dan pengurusan izin pemakaian senjata api, melakukan administrasi pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukuim dan tata tertip lapas, mengkoordinir pengaduan dari masyarakat melalui SMs dan kotak saran. Bidang ini di Ketuai oleh Bambang Supriyono, S.H. dan dibantu oleh 2 seksi yaitu:<sup>15</sup>

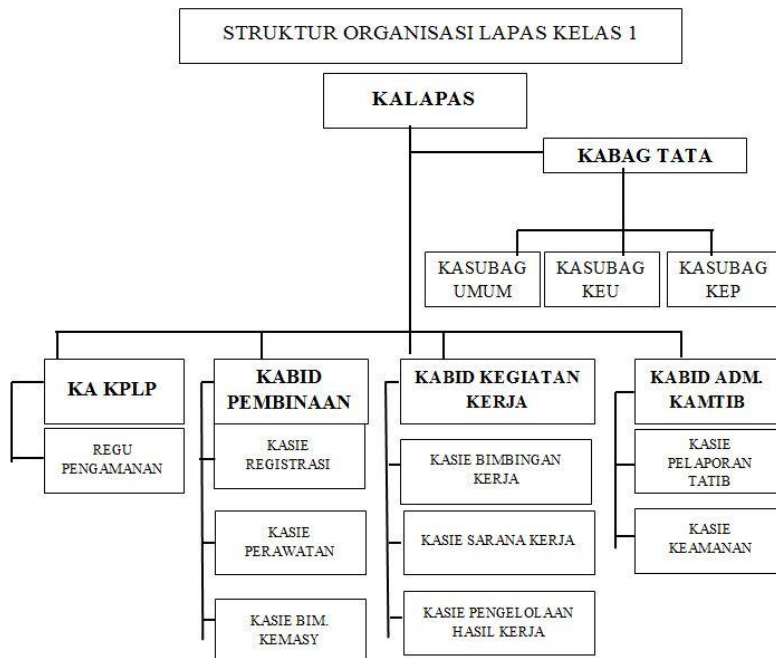
- a) Seksi Pelaporan Tata Tertib.
- b) Seksi Keamanan.

---

<sup>15</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, 9 januari 2018

Tabel I

## Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



Sumber: Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, tahun 2018.

**B. Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

**1. Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebagai proses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan yang akan menghasilkan bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali di lingkungan dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 9 januari 2018

**Tabel II**  
**Jumlah Narapidana dan Tahanan lembaga**  
**Pemasyarakatan Kelas I Semarang Tahun 2017<sup>17</sup>**

<b>Narapidana</b>		<b>Dewasa</b>	<b>Anak</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>BI</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>854</b>
	<b>BIIA</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	<b>BIIB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BIII</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	<b>PM</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
	<b>SH</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>924</b>
<b>Tahanan</b>	<b>AI</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
	<b>AII</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
	<b>AIII</b>	<b>304</b>	<b>1</b>	<b>305</b>
	<b>AIV</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
	<b>AV</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>508</b>	<b>1</b>	<b>509</b>
<b>Total</b>		<b>1432</b>	<b>1</b>	<b>1433</b>

*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,*

*Tahun 2018<sup>18</sup>. Per tanggal 9 Januari 2018.*

Keterangan:

B I : Narapidana yang di putus lebih dari 1 tahun.

B II A : Narapidana yang di putus 3 bulan sampai dengan  
12 bulan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Brosur Rekapitulasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,  
9 Januari 2018.

B II B : Narapidana yang di putus kurang dari 3 bulan.

B III : Subsider (Pidana Pengganti).

PM : Pidana Mati.

SH : Seumur Hidup.

A I : Tahanan Kepolisian.

A II : Tahanan Jaksa.

A III : Tahanan Pengadilan.

A IV : Tahanan Pengadilan Tinggi.

A V : Tahanan Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah 1433 orang, dimana jumlah narapidana sebanyak 924 orang, dan jumlah tahanan 509 orang, dari data tersebut jumlah narapidana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tahanan.

Jumlah narapidana terbanyak dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ada pada kelompok dewasa yaitu 924 orang, dan jumlah narapidana tersedikit

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

yaitu pada kelompok anak dan orang asing 0 orang. Sedangkan jumlah tahanan terbanyak pada kelompok dewasa yaitu 509 orang, dan jumlah tahanan kelompok pada anak yaitu 1 orang, dan paling sedikit yaitu kelompok asing 0 orang.<sup>20</sup>

**Tabel III**  
**Jumlah Narapidana yang mendapat Pembebasan**  
**Bersyarat**

<b>TAHUN 2017</b>		<b>TAHUN 2018</b>	
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Januari	8	Januari	11
Februari	10	Februari	-
Maret	19	Maret	-
April	0	April	-
Mei	19	Mei	-
Juni	19	Juni	-
Juli	28	Juli	-
Agustus	38	Agustus	-
September	0	September	-
Oktober	53	Oktober	-
November	12	November	-
Desember	20	Desember	-
Total	226	Total	11
Total Keseluruhan			
237			

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

*Sumber: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 9 januari 2018.<sup>21</sup>*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah pemberian pembebasan bersyarat pada tahun 2017 ada 226 orang dan di bulan januari tahun 2018 ada 11 orang, dari data diatas tersebut bahwasannya setiap bulannya untuk pemberian pembebasan bersyarat selalu berbeda-beda.<sup>22</sup>

## **2. Dasar Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Dasar pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sesuai dengan Undang-Undang yang menjelaskan tentang Pembebasan Bersyarat. Hasil dari wawancara antara penulis dengan narasumber Fajar Shodiq, S.H. selaku Staff Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.<sup>23</sup> Beliau banyak menjelaskan tentang Pembebasan Bersyarat bagi narapidana umum sampai

---

<sup>21</sup> Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang bagian Registrasi, 9 januari 2018.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Wawancara dengan Staff Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 29 Januari 2018.



dengan narapidana khusus, narapidana khusus yaitu meliputi (tindak pidana tipikor, terorisme, narkoba). Dan beliau menjelaskan tentang dasar dari pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana adalah Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat ini merupakan hak bagi semua narapidana yang telah tertera di Undang-undang tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam PP No. 32 Tahun 1999 PP No. 28 Tahun 2012, diperkuat dengan Permenkumham No. 21 Tahun 2013 dan Permen No. 21 Tahun 2016 merupakan hak yang diberikan kepada semua narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Syarat diberikannya Pembebasan Bersyarat bagi narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu:<sup>24</sup>

1. Berkelakuan baik selama proses pembinaan di dalam LP

Kriteria narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik agar mendapat pembebasan bersyarat haruslah mengikuti segala program

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

kegiatan yang diadakan oleh lapas untuk semua narapidana di dalamnya, meliputi pelatihan baris-berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis Al-Qur'an, latihan sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada didalam lapas, dan tidak menjalani hukuman disiplin.

Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah sedang tidak menjalani hukuman disiplin atau sanksi telah melanggar peraturan didalam lapas, dengan bukti dalam kurun waktu 6 bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan kesalahan berat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti menyelundupkan, menyimpan, mengedar, atau menyalahgunakan narkoba,

menyelundupkan, menyimpan, menggunakan telepon genggam, melakukan percobaan melarikan diri, menyelundupkan, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, melakukan penganiayaan pemukulan dan termasuk pengkroyokan, merusak kunci/gebok dan fasilitas dilapas lainnya, memprovokasi narapidana lainnya untuk melakukan keributan, dan lain-lain yang mengganggu ketenangan dan ketentraman didalam LAPAS.<sup>25</sup>

2. Telah melaksanakan pidana lebih dari 9 bulan.

Syarat untuk mendapat pembebasan bersyarat narapidan harus menjalani 2/3 dari masa pidananya, selanjutnya narapidana harus, dan telah menjalani masa pidana selama 9 bulan, dan minimal potongan 1/3 dari masa pidana, dimana narapidana yang masa pidananya kurang dari 9 bulan tidak bisa mendapat pembebasan bersyarat.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

3. *Jastis Colaborator* bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara tindak pidana khusus (Tipikor, Terorisme, Narkoba).

Narapidana harus menghubungkan jaringannya kepada pihak-pihak dan petugas-petugas terkait, bersedia dan mau membantu pihak yang berwajib untuk membongkar kejahatan tindak pidana khusus tersebut. Dimana narapidana membantu membongkar siapa saja yang ikut serta dalam kejahatan tindak pidana khusus ini, agar pihak yang berwajib mudah membuktikan dan menangkap orang-orang yang ikut serta dalam tindak pidana yang dimaksud.

4. Telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (Narapidana Tipikor)

Selain syarat-syarat diatas, narapidana tipikor harus membayar lunas denda uang pengganti

sesuai dengan putusan pengadilan, dan besarnya uang pengganti setiap narapidana berbeda-beda, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dimana setiap orang perkaranya tidak sama dan nominal uang yang dikorupsi juga berbeda, oleh karena itu membayar uang pengganti bagi narapidan tipikor di sesuaikan dengan keputusan pengadilan.<sup>26</sup>

### **3. Proses, Prosedur dan Tahapan Pemberian Pelepasan**

#### **Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Proses pemberian pelepasan bersyarat dapat dilaksanakan minimal  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana, jadi selaku petugas dapat menginformasikan kepada napi yang akan mendapat pelepasan bersyarat yang telah mendapat rekomendasi dari pihak lapas, agar tidak ada keterlambatan untuk pelaksanaan pemberian bersyarat, oleh karena itu pengurusan dapat dilakukan sebelum memasuki  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana, dikarenakan untuk pengurusan dan proses pembebasan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Staff Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 3 Januari 2018.

bersyarat tidak hanya di dalam lapas, akan tetapi melalui beberapa tahapan dan proses, dari Litmas (penelitian Pemasyarakatan) dan juga dari BAPAS (balai pemasyarakatan) setempat.<sup>27</sup>

Prosedur pengajuan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan telah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2013 dan No 21 Tahun 2016 tentang syarat dan tatacara pemberian remisi, Asimilisi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti atau mentaati semua proses pembinaan, dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

syarat pemberian pembebasan bersyarat, maka narapidana itu dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>28</sup>

Bagi semua para narapidana tersebut harus menjalani 2/3 dari masa pidananya untuk mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat dari lapas. Untuk bagi para napi pidsus (pidana khusus) harus mau kerjasama untuk membongkan dan membuka semua yang ikut serta dalam tindak pidana terkait kasus yang menjeratnya.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi oleh setiap narapidana, kemudian narapidana terkait akan disidang oleh pihak lapas (TTP tim pengamat pemasyarakatan) untuk menilai narapidana tersebut pantas dan lolos untuk mendapat pemberian bersyarat, jika setelah proses persidaangan itu selesai dan dalam persidangan telah disetujui oleh tim, akan di usulkan ke lapas dan oleh kepala lapas akan dikirim ke kantor wilaayah, kemudian akan diserahkan ke bapas setempat dan ini telah menjadin tanggunmg jawab bapas untuk membimbing narapida

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Staff Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 29 Januari 2018.

yang telah mendapat pembebasan bersyarat yang dditangani oleh PK (pembimbing kemasyarakatan).<sup>29</sup>

Tahap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga membuktikan dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Syarat Substantif:

- a. Telah menjalani pidana paling sedikit 2/3 maasa pidana.
- b. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat.
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (9 bulan terakhir untuk TIPIKOR dan TERORISME).
- d. Telah membayar luinas denda dan/atau uang pengganti yang diutus pengadilan. (TIPIKOR)

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Brosur dan poster yang berada di kantor Bimbingan kemasyarakatan. pada tanggal 29 Januari 2018.



e. Untuk pidana Terorisme telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI; atau
- Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana WNA.

2. Penyerahan berkas formulir penjaminan

3. Poliklinik lapas

- a. Pemeriksaan kesehatan di poliklinik lapas.
- b. Permohonan surat keterangan tidak ada perkara lain dari kejaksaan negeri.

4. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lapas.

5. Syarat Administratif;

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

- b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali masyarakat atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asseor.
- c. Keterangan tidak ada M.A.P atau surat pemberitahuan PB ke Kejaksaan Negeri.
- d. Salinan register F.
- e. Salinan daftar perubahan; dan
- f. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- g. Surat jaminan keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.
- h. Surat penetapan penahanan.
- i. Bukti pembayaran Lunas Denda dan Uang Pengganti (Tipikor).
- j. Surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari kepala Lapas dan/ atau kepada

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  
(Terorisme).

6. Pengiriman berkas ke Kantor Wilayah, oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
7. Dirjen Pemasyarakatan oleh TPP.
8. Terbit SK Pembebasan Bersyarat.
9. Pelaksanaan PB dan diserahkan ke BAPAS.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana yang dimaksud diatas, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Sedangkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Setelah beberapa tahapan dan prosedur yang telah dijalani oleh narapidana, selanjutnya narapidana tinggal menunggu surat keputusan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Staff Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 29 Januari 2018.

yang diterbitkan oleh KALAPAS yang atas persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah.<sup>32</sup>

Selanjutnya untuk membuktikan bagaimana tahapan dan proses dalam pemberian pembebasan bersyarat penyusun mewawancarai beberapa narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang sebagai objek perbandingan antara prosedur yang telah tertulis di undang-undang yang telah menerangkan syarat dan proses serta tahapan yang harus di lakukan oleh para narapidana agar bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, antara lainnya:

AW dengan kasus pidana narkoba, berasal dari kota jakarta, bahwa sebelum melakukan tindak pidana AW adalah berprofesi sebagai anggota pelayaran di Jakarta. Kegiatan sehari-harinya di lapas adalah sebagai Instruktur, yaitu bertugas memberikan pembinaan kesehatan yang diantaranya dari upacara, olah raga dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan narapidana. Bahwa beliau di vonis oleh pengadilan selama 6 tahun 3 bulan

---

<sup>32</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, 9 januari 2018

penjara, sekarang beliau sudah menjalani masa pidana selama 3 tahun 8 bulan. Yang awalnya beliau ditahan di Rumah Tahanan Militer, yang kemudian beliau pindah ke LP Cipinang Narkotik, lalu ke LP Pekalongan, dan kemudiian berakhir di LP Kedung Pane Semarang, tetapi beliau menganggap diantara beberapa LP tersebut tadi secara pelayanan dan pemenuhan hak lebih baik di LP Kedung Pane Semarang. Karena beliau menganggap di LP selain Kedung Pane semarang itu dalam pengurusan pembebasan bersyarat sangat lama, oleh karena itu beliau beberapa kali pindah ke LP dengan alasan seperti diatas tadi. Sebaliknya pengurusan pembebasan bersyarat di LP Kedung Pane sangatlah mudah dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan SK pembebasan bersyarat, beliau mengatakan untuk masalah proses pengurusan pembebasan bersyarat kurang lebih 1 bulan, kemudian beliau saat ini tinggal menunggu SK pembebasan bersyaratnya keluar.<sup>33</sup>

AK dengan kasus pidana penipuan, berasal dari Solo, bahwa sebelum melakukan tindak pidana AK adalah berprofesi sebagai

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan narapidana tindak pidana narkoba sikotropika (bapak AW). 24 Januari 2018.

perantara jual beli tanah dan rumah. Kegiatan kesehariannya di lapas adalah sebagai Instruktur, yaitu bertugas memberikan pembinaan kesehatan yang diantaranya dari upacara, olahraga dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan narapidana. Bahwa beliau divonis oleh pengadilan selama 1 tahun 10 bulan, sekarang beliau sudah menjalani masa pidana selama 9 bulan. Beliau memaparkan tentang proses pembebasan bersyarat di LP Kelas I Semarang yang begitu mudah dan begitu cepat, beliau mengatakan sejak masa  $\frac{1}{2}$  setengah dari masa hukuman sudah bisa mengurus syarat prasyarat untuk pembebasan bersyarat, dalam pengurusan beliau di beri arahan oleh petugas lapas jadi untuk masalah hambatan dalam pengurusan pembebasan bersyarat itu tidak ada dan beliau mengurusnya dalam waktu kurang lebih 1 bulan, dan untuk saat ini SK dari lapas sudah keluar, selanjutnya beliau tinggal menunggu untuk pelaksanaan pembebasan bersyaratnya dan kemudian beliau di limpahkan ke BAPAS.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan narapidana tindak pidana penipuan (bapak

T dengan kasus pidana korupsi, berasal dari Purwokerto, bahwa sebelum melakukan tindak pidana korupsi T adalah berprofesi sebagai ketua kelompok tani. Kegiatan kesehariannya adalah sebagai pengganti petugas untuk mengurus para napi lain dalam mengurus surat, mendata dan mengumpulkan ke bagian-bagian tertentu dalam surat tersebut. Beliau di vonis oleh pengadilan dengan hukuman penjara selama 4 tahun, dan saat ini beliau telah menjalani masa pidana selama 3 tahun 4 bulan. Beliau memaparkan bagaimana tentang proses pembebasan bersyarat dari kegiatan baris berbaris, kerohanian dan semua kegiatan yang ada di LP, harus berkelakuan baik selama dalam menjalani masa pidana di dalam lapas, dan harus ada peran aktif untuk semua narapidana agar bisa mendapat dan tidak melewatkan pemberian pembebasan bersyarat.<sup>35</sup>

Bahwa semua narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang bervariasi kasusnya, karena

---

AK). 24 Januari 2018.

<sup>35</sup> Wawancara dengan narapidana tindak pidana korupsi (bapak T). 24 Januari 2018.

pada dasarnya lapas tersebut adalah bersifat umum, dalam artian umum adalah semua kasus tindak pidana bisa masuk dan dibina dalam lapas kelas I Semarang.

Pada saat penulis wawancara pada narapidana tindak korupsi, bahwa beliau menjelaskan tahapan-tahapan atau prosedur untuk mendapatkan pembebasan bersyarat haruslah membayar denda dan melunasi uang pengganti dan berkelakuan baik. Napi tipikor juga memaparkan setiap harinya mematuhi aturan-aturan dan mengikuti kegiatan yang ada di dalam lapas. Sebagaimana yang sudah tertera kegiatan-kegiatan diatas. Selanjutnya untuk pengurusan berkas-berkas untuk pembebasan bersyarat, petugas dan pegawai lapas telah membantu pengurusan berkas yang diperlukan. Jangka waktu untuk mengurus pemberian bersyarat sekitar kurang lebih selama 1 bulan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

#### **A. Analisis Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Pelaku tindak kejahatan di Indonesia telah di berikan tempat terkhusus untuk mendidik dan memberi pembinaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, agar pelaku tindak kejahatan menjadi semakin baik setelah keluar dari tempat yang telah di khususkan untuk para pelaku tindak kejahatan dan membuatnya jera, dan tidak akan mengulangi tindakan yang mengakibatkan dia kembali lagi.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana semua narapidana mendapatkan perhatian khusus dari negara, karena di lembaga itulah tempat dimana semua penghuni di dalamnya telah melakukan kejahatan yang membahayakan

masyarakat dan bertentangan dengan undang-undang yang diatur oleh suatu negara.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.<sup>1</sup>

Pada dasarnya tujuan pemidanaan dalam suatu lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana adalah bentuk upaya negara untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri, membuat orang yang melanggar hukum menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat seseorang tidak lagi mengulang perbuatan yang membuatnya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kesekian kalinya. Dari sini sudah jelas bahwa tujuan pemidanaan adalah agar seseorang menjadi jera dan tidak

---

<sup>1</sup> C.I. Harsono. "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*". Jakarta, Djambatan, 1995. Hlm, 43.

akan mengulangi perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang itu akan kembali lagi masuk ke dalam penjara.

Seseorang yang telah melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang bersifat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka mereka akan di masukkan kedalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dimana seseorang disana akan mendapat pembinaan untuk menjadi lebih baik lagi setelah keluar dari lembaga tersebut. Bagi siapa saja narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang berkelakuan baik akan mendapatkan haknya sebagai narapidana yaitu salah satunya adalah pembebasan bersyarat.

Narapidana dan warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan juga mempunyai haknya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:<sup>2</sup>

(1)Narapidana berhak:

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hak-hak di atas untuk semua narapidana di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan sebagaimana yang telah tertulis didalam undang-undang yang telah mengatur sewaktu narapidana berada didalam lembaga pemasyarakatan.

Adanya hak-hak dalam undang-undang, pastinya ada juga undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme, sistem, proses dan prosedur yang harus dijalankan oleh para petugas dalam rangka untuk memenuhi hak-hak para narapidana yang telah diberikan dari Negara agar tidak berlawanan dengan undang-undang yang ada, antara lain dalam;

1. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>3</sup>
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>4</sup>
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> PP No. 32 tahun 1999 *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

<sup>4</sup> Permen No. 21 tahun 2013 *Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*

<sup>5</sup> Permen No 21 tahun 2016 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013*

4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan<sup>6</sup>.

Dengan adanya beberapa peraturan diatas, mengenai pemenuhan hak-hak bagi semua narapidana akan berjalan dengan semestinya, dan semua narapidana juga mengetahui bagaimana haknya dan prosedurnya agar hak-hak ia selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa terpenuhi dan dipenuhi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat kesesuaian terhadap dasar hukum yang diperoleh peneliti dengan yang digunakan petugas Lapas dalam melaksanakan pemberian Pembebasan Bersyarat, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis diatas tadi adalah beberapa undang-undang yang di jadikan dasar hukum oleh petugas Lapas.

Hasil dari wawancara penulis dengan petugas lapas, bahwa dalam pemberian Pembebasan Bersyarat petugas lapas

---

<sup>6</sup> PP No. 28 tahun 2012 *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*.

mengacu pada dasar-dasar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam pemberian pembebasan bersyarat. Adapun kebijakan-kebijakan lain yang diberikan petugas lapas untuk pemberian pembebasan bersyarat juga tidak ada. Selain mengacu pada undang-undang yang sudah ada, setidaknya dari pihak lapas memberikan kebijakan lain untuk pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dari petugas Lapa mengenai faktor dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut:



1. Peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisan dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengusulan Pembebasan Bersyarat.

2. Penjamin narapidana sehingga BAPAS tidak menyetujuinya.

Banyak narapidana yang penjaminnya bukan dari salah satu anggota keluarga narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya narapidana tersebut melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan.

3. Melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan narapidana

tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

4. Proses di Direktorat Jendral Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Pelaku tindak pidana yang ada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Hukuman di sini adalah penjara, dimana penjara adalah sebagai tempat untuk menjalani masa pidana. Pembebasan bersyarat yang diberikan bukan semata-mata hanya diberikan begitu saja atau cuma-cuma kepada narapidana, akan tetapi setiap narapidana haruslah melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang diantaranya memuat tentang syarat-syarat pembebasan bersyarat, agar mendapatkan pembebasan bersyarat pada umumnya adalah telah menjalani pidana sekurang-kurangnya

2/3 (dua per tiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Selain itu narapidana harus berkelakuan baik, penilaian berkelakuan baik pada nara pidana tidak terlepas dari pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan.

Menurut penulis secara pemenuhan hak-hak bagi narapidana telah dijalankan dengan semestinya dan telah mengikuti dengan undang-undang yang dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan hak-hak tersebut.

Ditinjau dari aspek filosofis bahwasannya pemidanaan bagi tindak pelaku kejahatan diberikan agar pelaku kejahatan jera atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga pemberian pembebasan bersyarat telah memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati kebebasan hidup diluar lembaga pemasyarakatan yang dimana lembaga tersebut untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan yang melanggar hukum.

Menurut penulis alangkah baiknya untuk memberikan efek jera bagi narapidana haruslah dari pihak lapas memberikan aturan-aturan lebih tersendiri untuk para

narapidana agar tidak begitu mudah mendapatkan pembebasan bersyarat, dan lebih memberikan efek jera bagi narapidana.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>7</sup>

Tujuan pembedaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pembedaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara

---

<sup>7</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>8</sup>

Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat, dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan *pengampunan*, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk

---

<sup>8</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.25.

menghormati hak-hak kemanusiaan, sesuai dengan qaidah Fiqihyah berikut ini.

التعزير يدور مع المصلحة

*“Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”*

Dalil selanjutnya yang menjelaskan tentang ta’zir terdapat di dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا<sup>ط</sup> فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: *“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.*

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman ta’zir, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi hidup masyarakat. Karena

kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari'at Islam. Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian:

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, dan
2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).

Dalam hal *pengampunan jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberi ampunan) sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masalalunya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari

penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, akan tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Furqan ayat 17:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ  
أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۚ

Artinya: *“Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah); “apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?”.*

Menurut pendapat lain dalam *Hasyiyah Ibn Abidin*, menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubatnya dalam hati itu, tidak dapat diamati.<sup>9</sup> Menurut Mahmud Syaltut, Tuhan sebagai otoritas yang tinggi, akan memberikan hukuman kepada

---

<sup>9</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 204.



manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan bersungguh-sungguh. Hal ini adalah merupakan syari'at dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.<sup>10</sup>

Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi adalah sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkannya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah menjatuhkan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam menjatuhkan hukuman yang

---

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam II*, ahli bahasa Facrudin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 29-30.

berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn Hambal. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain, hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus, baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan jarimah.

Dalam firman Allah yang menerangkan harus taatnya seseorang dengan Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri terdapat dalam Q.S An-Nissa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al*

*Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nissa' ayat 59)*

Selain itu pula ada perbedaan hukuman antara hukum *hudud* dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *hudud* diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman *ta'zir* pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila ada seorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana *jarimah ta'zir* maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya dengan seorang yang perilakunya tidak baik melakukan *jarimah ta'zir* yang sama, seorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman lebih berat.

Dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pembelaan dan ampunan, apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir*, kemungkinan untuk

memberikan pengampunan sangat terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah.

Dalam hal hukuman sebagai media pendidikan dan pembinaan, maka hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Indonesia yang diberikan kepada narapidana setelah narapidana tersebut menjalani pidananya dalam kurun waktu tertentu, yang telah melakukan dan menjalankan syarat ketentuan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Jadi pemberian Pembebasan Bersyarat disini bukanlah semata-mata pemberian secara cuma-cuma, akan tetapi ada kriteria dan syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada narapidana untuk mendapatkan hak tersebut. Untuk konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana yang ingin mendapatkan Pembabasan Bersyarat haruslah menjalani hukuman sedikit-dikitnya dalam kurun waktu sembilan bulan (9 bulan) atau  $\frac{2}{3}$  dari masa hukumannya, dan disamping itu narapidana yang bersangkutan harus menunjukan perilaku

yang baik selama menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dari keterangan diatas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian Pembebasan Bersyarat di Indonesia (dalam hukum pidana positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk mendapatkan haknya, yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana, menyesali perbuatannya, berniat baik untuk berubah dan tidak mengalangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah ditetapkan. Kesimpulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penyusun lakukan, dasar dalam pemberian pembebasan bersyarat yang telah diterapkan oleh pihak Lapas kelas I Semarang, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14. Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 21

Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pasal 49 ayat (1). Syarat diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut: Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$ , dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

2. Pembebasan Bersyarat dalam hukum pidana Islam adalah *pengampunan*, maksud dan tujuan pemberian Pembebasan Bersyarat salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (taubat) dari pelaku tindak pidana, *Pengampunan*

(pembebasan bersyarat) disini hanya berlaku dalam *jarimah ta'zir*, karena dalam *jarimah ta'zir* macam hukumannya tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalil mengenai pengampunan (taubat) dalam *Jarimah Ta'zir* terdapat di dalam Al-Qur'an di Q.S An-Nissa 16.

## **B. Saran**

Atas dasar penelitian yyang lakukan, penulis memberikan saran untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pengusulan, proses, dan syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana diberikan kebijakan tambahan selain yang sudah tertera di dalam perundang-undangan yang ada, agar setiap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Azwar, Saifudin. “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008).
- Chazawi, Adami. “*Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*”. Jakarta, Raja Grafindo Persada 2002.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam”* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi, A. Rahman I, *Syari’ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, “*Hudud dan Kewarisan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Hafidh, Muhammad. “*Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hanum, Arinal Nurrisyad. *“Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. 2012.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Cet. III, Jakarta: Amzah, 2013.

Jaza'iri, Shaikh Abu Bakar Jabir al-, *Minhajul Muslimin*, Cet. VIII, Jakarta: Darul, Haq. 2013.

Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam. 1978.

Kurniawan Bombing, Ardy. *“Pemenuhan Hak Narapidana Meendapatkan Bebas Bersyarat studi Kasus Di Rutan Kelas II B Makale”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. 2013.

Marzuki, *“Metodologi Riset”* Yogyakarta; BPFE, 2006.

Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Revisi”*. Renika Cipta, Jakarta. 2008.

Moleong, Lexy J. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung; Remaja Rosda Karya, 2010.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta:

Logung Pustaka. 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. “*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam fikh jinayah*”. Jakarta. Sinar Grafika 2006.

Nawawi dan Nini Martini, Hadari. “*Penelitian Terapan*”, (yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996).

Prasetyo, Teguh. “*Hukum Pidana*”. Raja Grafindo Persada, Jakarta. September 2012.

Priyatno, Dwidja. “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*”. Bandung. Refika Aditama. 2006

Sasmita, Qiwamuddin Tata Adi. “*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yogyakarta)*”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

Setiady, Tolib . “*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*”. (Jakarta:Alfabeta, 2010).

Simamarta, Berlian. *“Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris (Jurnal Mimbar Hukum Volume 23)”*, nomor 3, Oktober 2011.

Sunarto, Siswanto. *“Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi”*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Januari 2015.

Syaltut, Mahmud. *“Akidah dan Syari’at Islam II, ahli bahasa Facruddin HS”*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Waluyo, Bambang . *“Pidana dan Pembinaan”*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Widnyana, I Made. *“Asas-asas Hukum Pidana “Buku Panduan Mahasiswa”*. Jakarta. Fikahati Aneska. 2010.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

PERMENKUMHAM No 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

PERMENKUMHAM No 21 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/> di unduh tanggal 13 Januari 2018 jam 13:33 WIB.

<http://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>. Selasa, 27 Februari 2018. Pukul: 21:16 WIB.

<http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hukum-pidana-islam-dan-fiqh-jinayah.html?m=1>. Selasa, 27 Februari 2018. Pukul 21:44 WIB.

<http://mimpiku-wwwmimpiku.blogspot.co.id/2010/03/dasar-dasar-hukum-pembinaan-pembebasan.html>. Selasa, 27 Februari 2018. Pukul: 22:03 WIB.

# Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795

Email : [karwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:karwil.jateng@kemenkumham.go.id) website : <http://jateng.kemenkumham.go.id>

3 November 2017

Nomor : W13.PK.01.04.01-1505  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Yth.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syarifah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor: B-2983/Un.10.1/D1/TL.01/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 hal tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami dapat menyetujui izin riset pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang kepada mahasiswa Fakultas Syarifah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :

Nama : Iqbal Mursyid

NIM : 122211039

Waktu pelaksanaan : Bulan, November 2017 s/d Januari 2018

Dalam rangka kegiatan tersebut diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap mahasiswa yang akan melakukan riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemasyarakatan kepada masyarakat / Perguruan Tinggi.
2. Berikan pelayanan yang baik dan profesional dengan membentuk / menunjuk Tim Pendampingan dari unsur pejabat / staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
3. Tim Pendampingan bertugas memberikan petunjuk, penjelasan dan data – data yang diperlukan dalam riset, serta ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh mahasiswa tersebut selama melakukan riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
4. Pelaksanaan riset agar dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan penghuni serta tidak boleh memotret / menshooting blok / kamar hunian dan lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terkait dengan kepentingan keamanan.
5. Karya tulis hasil riset agar diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah masing – masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



Atas Nama Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan

DITAMBAH  
DITAMBAH

2016 19580605 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syarifah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Nama : Fajar Shodiq. S.H.

Jabatan : Staf Bimbingan Pemasyarakatan

1. Apa tujuan di berikannya pembebasan bersyarat bagi narapidana ?
2. Apa dasar dari pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana ?
3. Siapa yang berwenang dalam pemberian pembebasan bersyarat ?
4. Apa saja syarat yang di berikan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat ?
5. Bagaimana tahapan dan prosedur pemberian pembebasan bersyarat ?
6. Bagaimana penilaian terhadap narapidana sehingga dikatakan berkelakuan baik ?
7. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ?
8. Berapa lama dalam proses pengurusannya ?
9. Perbedaan antara narapidana umum dan khusus untuk syarat dan prosedur dalam pemberian pembebasan bersyarat ?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA NARAPIDANA DI  
LAPAS KELAS I SEMARANG

1. Nama, Umur, Asal ?
2. Terjerat kasus apa ?
3. Telah di vonis oleh pengadilan berapa lama ?
4. Sudah menjalani masa pidana berapa lama ?
5. Program pembinaan seperti apa yang telah bapak ikuti selama di lapas ?
6. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat apa yang saudara lakukan ?
7. Hambatan selama anda mengurus pembebasan bersyarat ?
8. Apakah saudara sudah membayar uang denda dan uang pengganti ?
9. Apakah saudara telah mendapat surat keterangan dari BNPT ?
10. Adakah peran dari petugas lapas dalam pemberitahuan bahwa anda bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Mursyid

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 25 Maret 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Meteseh Rt. 01/ Rw. 01, Kec.  
Tembalang, Semarang.

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. MI Al-Mutta'alimin           | Tahun Lulus 2006 |
| 2. MTs Taqwal Illah             | Tahun Lulus 2009 |
| 3. MA Taqwal Illah              | Tahun Lulus 2012 |
| 4. Masuk UIN Walisongo Semarang | Tahun 2012       |

Semarang, 27 November 2018

Penulis,

Iqbal Mursyid